

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

FEBRIAN HATY RAMADHAN

B 200140 366

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

FEBRIAN HATY RAMADHAN

B 200 140 366

Telah diperiksa dan disetujui oleh
Dosen Pembimbing



Dra. Rina Trisnawati, M.Si.,Akt.,Ph.D

NIK.641/0605016701

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

FEBRIAN HATY RAMADHAN

B 200140366

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 11 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Rina Trisnawati, M.Si.,Akt.,Ph.D.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Achyani, S.E, M.Si.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si.
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Syamsudin, MM)

NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 April 2018

Penulis



FEBRIAN HATY RAMADHAN

B 200 140 236

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI SDM, DAN
KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Staf Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This present study was intended to identify the impact of the implementation of government accountancy standard, internal control system, human resource competency, and accounting staff competency, on the financial statements quality in Surakarta government. The population in this study is a accounting staff at the Departments of the Regency Government Surakarta. The sample was determined using Sampling Purposive Method and the respondents totaled 72. The data used were the primary data. The data were collected through questionnaire. The data were analyzed using the multiple linear regression analysis assisted with the SPSS version 20.00 program. This study showed that the government accountancy standard and human resource competency has no effect the financial statements quality while the internal control system and accounting staff competency affect the financial statements quality.

Keywords : government accountancy standard, internal control system, human resource competency, accounting staff competency, financial statements quality.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah

menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (Ratifah dan Ridwan, 2012).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu

dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Udiyanti et al, 2014).

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staff akuntansi yang ada (Udiyanti et al, 2014)

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Udiyanti et al, 2014).

Menurut Udiyanti et al (2014) Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi, dan persyaratan hutang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem

pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang baik dan tepat, dibutuhkannya suatu analisa dan evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan. Standar Auditing Seksi 319 *Pertimbangan atas Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan* Lampiran A paragraf 84 menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penaksiran resiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) Pemantauan. Menurut Putri et al (2015) Agar struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian internal sehingga akan mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian internal yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan (Putri et al, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat

dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Udiyanti et al, 2014).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015).

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Menurut Putri et al, (2015) Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Berbicara tentang kualitas laporan keuangan, selain diperlukan penerapan Standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia yang baik tentunya dalam menyusun laporan keuangan diperlukan kompetensi yang baik dari staf akuntansi.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti et al, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surakarta dan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di waktu yang akan datang, serta diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan referensi untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkan permasalahan yang terkait.

2. METODE

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012 : 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai staf bagian akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi di masing-masing Dinas pada SKPD, Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Pegawai yang bersedia mengisi kuesioner.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survey dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar, sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Metode Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012 : 199). Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2012:132). Pengukuran dengan skala Likert, yaitu setiap pilihan jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 5 poin sebagai skor tertinggi dan 1 sebagai skor terendah. Kriteria penentuan skor adalah Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. (Putri et al, 2015)

Variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 13 Butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (Febrian, 2015 dan Ruri, 2013 yang instrumennya dikembangkan sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013). Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan indikator yaitu : Relevan, Andal , Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Udiyanti et al, 2014) .

Variabel standar akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 10 Butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (Nurlan Darise, 2008). Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dengan indikator yaitu : Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP, Prosedur pencatatan akuntansi dengan pencatatan standar akuntansi yang berlaku umum, Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. (Putri et al, 2015).

Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 22 Butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang

dilakukan oleh (Ni Made Sudiarianti, 2014). Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan indikator yaitu : Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan

Sumber daya manusia adalah seorang atau individu yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. (Wijayanti, 2017).

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 15 Butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (Febrian, 2015 dan Ruri, 2013). Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yaitu : Latar belakang pendidikan, Pendidikan dan pelatihan.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. (Udiyanti et al, 2014).

Variabel kompetensi staf akuntansi diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 6 Butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (Novia, 2015).

Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini ialah Badan dan Dinas dari SKPD yang ada di Kota Surakarta yaitu berjumlah 28 kantor. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pejabat struktural dan seluruh aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi di masing-masing Badan dan Dinas pada SKPD Kota Surakarta yang diambil secara *purposive sampling*. Diperoleh sampel sebanyak 28 SKPD Kota Surakarta, sehingga disebar kuesioner sebanyak 80 kuesioner. Responden

mendapat kesempatan waktu untuk mengisi kuesioner dalam kurun waktu 1 minggu sampai 2 minggu, namun dalam realitanya kuesioner dapat diterima kembali dalam kurun waktu 3 minggu setelah pengiriman.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Standar Akuntansi Pemerintahan nilai t_{hitung} (0,414) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,679) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,681 > 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_1 ditolak, artinya variabel standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan hasil penelitian yang dilakukan Inapty (2016) yang memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan kompetensi aparatur yang minimal. Temuan ini juga diperkuat berdasarkan hasil survey di lokasi yang memberikan gambaran banyaknya pengelola keuangan yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen), (Inapty, 2016).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel sistem pengendalian intern nilai t_{hitung} (2,137) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,657) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,039 < 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_2 diterima, artinya variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan hasil penelitian yang dilakukan Udiyanti (2014), Putri (2015), Kiranayanti (2016), dan Nagor (2015) yang memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Sistem pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pengendalian internal yaitu: menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada, melindungi harta milik perusahaan, memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Udiyanti, 2014).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel kompetensi sumber daya manusia nilai t_{hitung} (1,067) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,657) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,292 > 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_3 ditolak, artinya variabel kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan hasil penelitian yang dilakukan Nadirsyah (2015) dan Wijayati (2017) yang memberikan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti tidak semua aparatur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pegawai dituntut untuk dapat memahami penyusunan laporan dengan menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawai. Terlebih lagi bidang pendidikan para pegawai juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan permasalahan laporan keuangan. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu sampai dua pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan dan pengelola bagian akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nurillah, 2014).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel kompetensi staf akuntansi nilai t_{hitung}

(3,082) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,657) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,004 < 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_4 diterima, artinya variabel kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan hasil penelitian yang dilakukan Desiana (2012), Udiyanti (2014) yang memberikan bukti bahwa kompetensi staf berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti dengan kompetensi staf akuntansi yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin membaik. Berdasarkan data pegawai yang diberikan sebelum dilakukan penyebaran kuesioner diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia dibidang akuntansi pada SKPD Kota Surakarta diakui masih kurang baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Akan tetapi dari hasil pengujian data telah membuktikan adanya pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut ditutupi oleh pengalaman kerja pegawai yang bekerja lebih dari 5 tahun. Walaupun demikian pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan fungsi dan sistem akuntansi/keuangan harus terus dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Walaupun sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah sangat canggih jika tidak didukung dengan kompetensi dan skill khusus oleh pegawai bagian akuntansi maka semua sarana dan prasarana itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Maka dari itu sangat penting sekali adanya kompetensi dari staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga nantinya pemerintah tidak perlu khawatir lagi mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan karena dalam proses penyusunan laporan keuangan, pegawai

bagian keuangan harus memiliki kompetensi yang baik sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material. Penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan Standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal akuntansi pun tidak akan bisa menghasilkan laporan keuanganyang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti, 2014).

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Variabel standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_1 ditolak, karena diperoleh nilai t_{hitung} (0,414) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,679) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,681 > 0,05$ (α), Variabel sistem pengendalian internberpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_2 diterima, karena diperoleh nilai t_{hitung} (2,137) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,657) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,039 < 0,05$ (α), Variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_3 ditolak, karena diperoleh nilai t_{hitung} (1,067) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,657) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,292 > 0,05$ (α), Variabel kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_4 diterima, karena diperoleh nilai t_{hitung} (3,082) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,657) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,004 < 0,05$ (α).

4.2 Keterbatasan Penulis

Penulis menyadari penelitian yang dilaksanakan ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya maupun pembaca. Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak dapat mengawasi secara langsung atas

pengisian jawaban tersebut, dikarenakan hampir semua kuesioner tersebut pada saat pengisian tidak dapat di tunggu secara langsung, sehingga jawaban dari responden mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden.

Faktor kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbatas pada standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi staf akuntansi saja sehingga cakupannya kurang luas untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan manajemen. Selain itu, terdapat kemungkinan variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen.

Objek penelitian hanya terbatas pada Badan dan Dinas pada SKPD Kota Surakarta, sehingga hasil akhir tidak dapat di generalisir.

4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut: Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode survey dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen seperti komitmen organisasi serta menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini, Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian lain atau dapat membandingkan dengan daerah lain sehingga cakupannya lebih luas untuk memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Agung, Rai I Gusti. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Grafindo
- Ahmad Ruky. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Alfiani, Nur. 2017. *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Andini Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I. 24 (1).
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Budiawan, Desiana Anugrah Dan Budi S. Purnomo. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : PT Indeks
- Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Desiana, Desi. 2014. *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas*. Skripsi. Bandung Universitas Widyatama
- Firdaus, SE, Dr. Nadirsyah, SE, M.Si, Ak, CA, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No. 1, 45-54
- Fitriani, Irma Idnil. 2012. *Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multijasa di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gudono. 2014. *Analisis Data Multivariat. Edisi Keempat*. Cetakan Pertama. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Harifan, Handriko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Padang*. Skripsi Universitas Negeri Padang. Padang.